



Katalog BPS : 4102004.5105

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013

<http://klungkungkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KLUNGKUNG**





Katalog BPS : 4102004.5105

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2013**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KLUNGKUNG**



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KLUNGKUNG 2013

ISBN : 978-602-71000-3-9  
No. Publikasi : 51052.14.13  
Katalog BPS : 4102004.5105  
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm  
Jumlah Halaman : v + 38 halaman

## **Naskah :**

Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Klungkung

## **Diterbitkan Oleh :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung  
Jl. Besakih, Desa Akah, Kecamatan Klungkung  
Semarapura 80751, Phone : (0366) 21180

## **DI CETAK OLEH:**

Percetakan "arysta jaya"  
Jln. Jayagiri XIII No.29 Telp. (0361) 231828  
Denpasar 80234

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.



## Kata Pengantar

Penyusunan publikasi dengan judul “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung Tahun 2013” merupakan publikasi pertama di bidang kesejahteraan rakyat yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Klungkung. Publikasi ini secara umum memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung tahun 2013.

Beberapa indikator yang dibahas didalamnya antara lain kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, pendidikan, perumahan, dan pembangunan manusia. Diterbitkannya publikasi ini, diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Klungkung.

Meskipun publikasi ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya, disadari masih terdapat kelemahan dalam analisa data. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca dan pengguna data merupakan evaluasi untuk penyempurnaan publikasi mendatang.

Atas perhatian dan bantuan semua pihak disampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga publikasi ini bermanfaat.

**Semarang, November 2014**  
**Badan Pusat Statistik**  
**Kabupaten Klungkung**  
**Kepala,**



**Ir. I Made Antara Yasa, M. Agb**  
**NIP.19650319 199301 1001**



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Sumber Data .....	2
1.2 Tujuan .....	3
BAB II    GEOGRAFIS, PENDUDUK DAN TENAGA KERJA .....	4
2.1 Letak Geografis .....	4
2.2 Penduduk .....	5
2.3 Tenaga Kerja .....	8
BAB III    KONDISI SOSIAL .....	13
3.1 Kemiskinan .....	13
3.2 Pendidikan .....	15
3.2.1 Angka Melek Huruf .....	16
3.2.2 Partisipasi Sekolah .....	18
3.2.3 Angka Putus Sekolah .....	22
3.2.4 Ijasah Tertinggi Yang Ditamatkan .....	23
3.2.5 Rata-rata Lama Sekolah .....	24
3.3 Perumahan .....	25
3.3.1 Kualitas Bangunan Rumah .....	26
3.3.2 Fasilitas Rumah .....	28
3.4 Indeks Pembangunan Manusia .....	30
3.4.1 Indikator Kesehatan .....	33
3.4.2 Indikator Pendidikan .....	34
3.4.3 Indikator Pendapatan .....	36



## DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Indikator Kependudukan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013.....	5
2.	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2012 – 2013.....	9
3.	Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2012 – 2013.....	11
4.	Persentase Penduduk Kabupaten Klungkung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja dan Menganggur Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013.....	12
5.	Indikator Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013.....	14
6.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013.....	17
7.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013.....	19
8.	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013....	20
9.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013....	22
10.	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013.....	23
11.	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013.....	24
12.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013.....	25
13.	Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013.....	27
14.	Indikator Fasilitas Perumahan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013.....	29
15.	IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013.....	32
16.	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013.....	33

17. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013.....	35
18. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013.....	36
19. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2011 – 2013.....	37

<http://klungkungkab.bps.go.id>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	
1.	Piramida Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2013 .....	7

<http://klungkungkab.bps.go.id>



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang berjalan terus menerus, secara sadar dan terencana. Sasaran utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Tujuan nasional bangsa Indonesia secara detail tertuang dalam amanat pembukaan UUD 1945. Salah satu amanat pembukaan UUD 1945 yang terus digaungkan selama 69 tahun tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan mempunyai makna suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan dalam hal ini mencakup dimensi lahir batin, material dan spiritual.

Untuk mengukur capaian kesejahteraan, BPS telah menghimpun beberapa indikator. Indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperoleh melalui beberapa kegiatan statistik. Dengan adanya indikator-indikator ini monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan dapat dilakukan.

Oleh sebab itu, BPS Kabupaten Klungkung menyusun publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung Tahun 2013. Publikasi ini menggambarkan Kabupaten Klungkung dari berbagai sisi, mulai dari kependudukan, ketenagakerjaan, dan keadaan sosial masyarakatnya. Gambaran ini tentu dapat digunakan sebagai informasi pendukung perencanaan pembangunan.

### **1.1 Sumber Data**

Terdapat berbagai jenis data yang ditampilkan dalam publikasi ini. Data-data penyusun indikator kesejahteraan rakyat ini berasal dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Sensus Penduduk (SP)  
Sensus Penduduk merupakan kegiatan statistik yang dilakukan selama 10 tahun sekali. Dari kegiatan sensus ini diperoleh data kependudukan yang mencakup seluruh penduduk pada suatu titik waktu tertentu.
- b. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)  
Tuntutan kontinuitas data ketenagakerjaan mendesak BPS untuk melakukan kegiatan berupa survei. Pengumpulan data ini dilakukan secara triwulanan dengan sejumlah sample. Dari kegiatan ini diperoleh data ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan keadaan seluruh penduduk pada tahun tertentu.
- c. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)  
Susenas merupakan kegiatan survei untuk mengumpulkan data di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, KB,

perumahan, serta kondisi pengeluaran yang sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Pengumpulan data ini dilakukan secara triwulanan dengan sejumlah sample yang dapat menggambarkan keadaan seluruh penduduk pada tahun tertentu.

## **1.2 Tujuan**

Melalui penyajian data berupa tabulasi serta ulasan dalam “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung Tahun 2013 ini, diharapkan dapat:

- a. Memberikan gambaran umum mengenai kesejahteraan rakyat di Kabupaten Klungkung, kondisi tahun 2013
- b. Memenuhi kebutuhan data statistik di bidang kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, pendidikan, perumahan, dan pembangunan manusia.



## BAB II

### GEOGRAFIS, PENDUDUK DAN TENAGA KERJA

#### 2.1 Letak Geografis

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang memiliki luas terkecil kedua setelah Kota Denpasar, secara geografis terletak antara  $115^{\circ}02'12''$ – $115^{\circ}37'43''$  Bujur Timur dan  $008^{\circ}27'37''$ – $008^{\circ}49'00''$  Lintang Selatan dengan luas wilayah  $315 \text{ km}^2$ . Wilayah Kabupaten Klungkung dua pertiganya ( $20.284 \text{ Ha}$ ) berada di kepulauan Nusa Penida, Ceningan dan Lembongan dan hanya sepertiganya ( $11.216 \text{ Ha}$ ) ada di daratan Pulau Bali. Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Nusa Penida dengan luas wilayah  $202,84 \text{ km}^2$ , Kecamatan Banjarangkan dengan luas wilayah  $45,73 \text{ km}^2$ , Kecamatan Klungkung dengan luas wilayah  $29,05 \text{ km}^2$ , dan Kecamatan Dawan yang memiliki luas wilayah seluas  $37,38 \text{ km}^2$ .

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli
- Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Gianyar

Dengan total panjang pantai Kabupaten Klungkung yang mencapai  $97,6 \text{ km}$ , potensi maritim di Kabupaten Klungkung sangat baik. Hal ini menyebabkan peluang pengembangan budidaya rumput laut dan penangkapan ikan laut di Kabupaten Klungkung sangat besar.

## 2.2 Penduduk

### 2.2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu sumber daya dalam pembangunan. Secara teori, Jumlah penduduk yang besar bisa dianggap sebagai faktor yang positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini berlaku jika dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk itu sendiri. Peningkatan kualitas akan meningkatkan produktivitas dan akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas justru hanya akan menjadi beban dalam pembangunan, dengan munculnya berbagai masalah kependudukan seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan berujung pada keamanan.

**Tabel 1.**  
**Indikator Kependudukan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013**

No	Uraian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	172.100	172.900	173.900
2	Pertumbuhan Penduduk (%)	0.58	0.46	0.58
3	Kepadatan Penduduk	546	549	552

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 jumlah penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 155.262 jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan hingga mencapai 170.543 jiwa. Hal ini berarti bahwa setiap tahun terjadi kenaikan jumlah penduduk rata-rata sebesar 0.95 persen. Angka ini sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990-2000 yang hanya sebesar 0.31 persen per tahun. Namun, bila dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung masih dibawah dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali yang mencapai 2,15 persen per tahun. Walaupun demikian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk masih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Klungkung pada tahun 2013 mencapai 173.900 jiwa yang terdiri dari 86.000 jiwa laki-laki dan 87.900 jiwa perempuan.

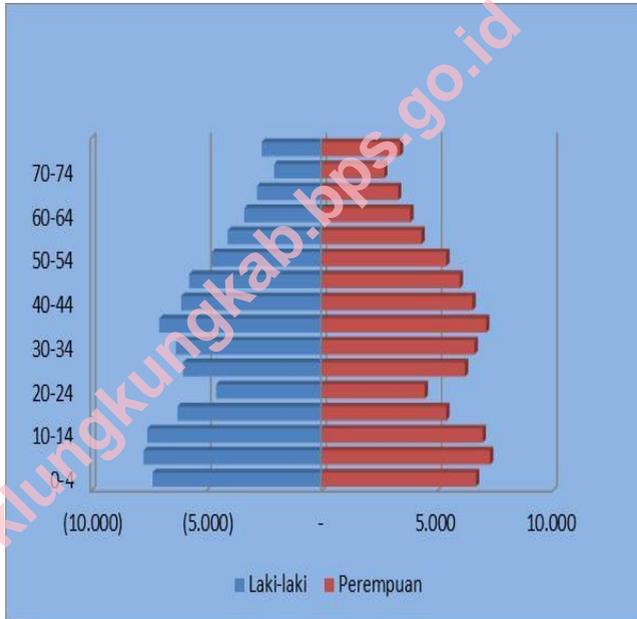
### **2.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Untuk mendapatkan gambaran penduduk yang lebih lengkap selain jumlah penduduk, struktur umur penduduk juga perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan struktur piramida penduduk, penduduk Kabupaten Klungkung tergolong dalam piramida penduduk expansive karena sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok umur muda. Pada tahun 2013, sebesar 24,56 persen merupakan penduduk usia muda (0 – 14 tahun), 65,38

persen penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) dan sisanya sebesar 10,06 persen merupakan penduduk usia tua (65 tahun ke atas).

Gambar 1.

**Piramida Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2013**



Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk

Selain untuk melihat gambaran penduduk dalam piramida penduduk, struktur umur penduduk ini digunakan untuk menentukan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu proporsi penduduk tidak produktif (usia muda dan usia tua) dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Semakin tinggi nilai *dependency ratio* mengindikasikan beban yang ditanggung oleh

masing-masing penduduk usia produktif semakin besar. Pada tahun 2013 *dependency ratio* Kabupaten Klungkung sebesar 52,94 persen, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 53,28 persen. Angka 52,93 persen menunjukkan bahwa pada tahun 2013, 100 orang produktif menanggung 53 orang tidak produktif.

### 2.3 Tenaga Kerja

Penduduk merupakan sumber tenaga kerja untuk menghasilkan barang maupun jasa. Namun demikian, tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk yang termasuk dalam penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan menganggur, sedangkan bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2013, penduduk usia kerja di Kabupaten Klungkung mencapai 132.402 jiwa. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 102.889 jiwa merupakan angkatan kerja. Hal ini dapat juga dikatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Klungkung sebesar 77,71 persen, atau dengan kata lain ada sekitar 77,71 persen penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif dalam

perekonomian. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 76.01 persen.

**Tabel 2.**  
**Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung**  
**Tahun 2012-2013**

<b>Indikator</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
❖ <b>Penduduk Usia Kerja</b>	132.752	132.402
• <b>Angkatan Kerja</b>	100.907	102.889
- <b>Bekerja</b>	98.834	100.703
- <b>Menganggur</b>	2.073	2.186
• <b>Bukan Angkatan Kerja</b>	31.845	29.513
- <b>Sekolah</b>	9.247	9.067
- <b>Mengurus Rumah Tangga</b>	16.400	15.971
- <b>Lainnya</b>	6.198	4.475
➤ <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	76,01	77,71
➤ <b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	2.05	2,12
➤ <b>Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)</b>	97,95	97.88

Sumber : Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

Dari sebanyak 102.889 jiwa angkatan kerja, terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 100.703 jiwa dan yang menganggur sebanyak 2.186 jiwa. Disamping TPAK, indikator ketenagakerjaan yang lain adalah pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan suatu usaha. Adanya pengangguran menggambarkan terdapatnya kelebihan tenaga kerja di suatu wilayah yang tidak terserap di dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klungkung pada tahun 2013 sebesar 2,12 persen. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,05 persen. Dengan demikian sebanyak 97,88 persen dari penduduk usia kerja yang telah terserap di pasar kerja.

Perekonomian Kabupaten Klungkung pada tahun 2013 masih bertumpu pada sektor pertanian, oleh karena itu tidak mengherankan jika sektor ini merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu mencapai 26,26 persen penduduk yang bekerja. Disusul sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi yang menyerap tenaga kerja sebanyak 25,29 persen penduduk yang bekerja. Selain kedua sektor tersebut, jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan juga menyerap banyak tenaga kerja yakni sebanyak 19,95 persen. Sisanya tersebar di sektor industri sebanyak 13,84 persen, dan sektor lainnya (pertambangan, konstruksi, transportasi, dll) sebanyak 14,65 persen.

Sebaran penyerapan tenaga kerja oleh masing-masing sektor pada tahun 2013 tidak berbeda jauh dengan tahun 2012, hal ini bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 3.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2012-2013**

No	Lapangan Usaha Utama	2012		2013	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian	25.702	26,01	26.448	26,26
2	Industri	14.484	14,65	13.941	13,84
3	Perdagangan dan Jasa Akomodasi	24.615	24,91	25.470	25,29
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	17.668	17,88	20094	19,95
5	Lainnya	16.365	16,56	14.750	14,65
	<b>Jumlah</b>	<b>98 834</b>	<b>100</b>	<b>100.703</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator kualitas tenaga kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk semakin tinggi pula kualitas tenaga kerja tersebut yang pada akhirnya semakin tinggi pula peluangnya untuk bersaing di pasar kerja. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah merupakan salah satu masalah utama kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2013 penduduk Kabupaten

Klungkung yang bekerja didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama ke atas yang mencapai 58.659 jiwa (58,25 persen). Namun demikian, penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar ke bawah juga cukup tinggi, yaitu mencapai 42.044 jiwa (41,75 persen). Ini menunjukkan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Klungkung masih rendah. Di sisi lain, sebagian pengangguran di Kabupaten Klungkung merupakan pengangguran intelektual. Sebanyak 71,45 persen penganggur justru berpendidikan SLTA dan perguruan tinggi.

**Tabel 4.**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas**  
**Kabupaten Klungkung Yang Bekerja dan Menganggur Menurut**  
**Tingkat Pendidikan Tahun 2013**

No	Tingkat Pendidikan	Bekerja	Menganggur
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tdk/Blm Pernah Sekolah	9,99	6,95
2	Tdk/Blm Tamat SD	17,60	4,94
3	SD	14,17	5,17
4	SMP	19,07	11,48
5	SMA/SMK	27,01	46,61
6	Akademi/DIII	4,08	19,03
7	Universitas	8,10	5,81
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional



## BAB III KONDISI SOSIAL

### 3.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Indonesia dan beberapa negara lainnya mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*cost of basic needs*). Dengan kata lain kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Dengan pendekatan ini, penduduk miskin dapat didefinisikan sebagai penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kkal per kapita per hari serta kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

**Tabel 5.**  
**Indikator Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013**

No	Indikator Kemiskinan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Garis Kemiskinan	223.639	233.764	246.615
2	Persentase Penduduk Miskin (P0)	6,10	5,37	7,01
3	Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,66	0,77	0,79
4	Keparahan Kemiskinan (P2)	0,11	0,16	0,14

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Garis kemiskinan Kabupaten Klungkung yang terus meningkat dari tahun ke tahun akibat peningkatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar, ternyata tidak serta merta menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin. Hal ini terlihat dari berfluktuasinya besaran persentase penduduk miskin dari tahun 2011 hingga 2013.

Peningkatan persentase penduduk miskin yang cukup tajam pada tahun 2012 ke tahun 2013 disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah peningkatan harga BBM yang merembet pada kenaikan kebutuhan pokok. Selain itu, penurunan produksi beberapa komoditi sektor pertanian yang merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Klungkung juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya persentase penduduk miskin.

Meningkatnya persentase penduduk miskin pada tahun 2013 ternyata dibarengi pula dengan peningkatan kedalaman kemiskinan. Pada tahun 2012 kedalaman kemiskinan Kabupaten

Klungkung sebesar 0,77 menjadi 0,79. Peningkatan ini menandakan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan meningkat atau dengan kata lain rata-rata pengeluaran kemiskinan sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Namun demikian, keparahan kemiskinan Kabupaten Klungkung tahun 2013 mengalami penurunan dari 0,16 menjadi 0,14. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin. Penurunan ini menunjukkan makin homogenya pengeluaran antara penduduk miskin.

### **3.2. Pendidikan**

Dalam Pembukaan UUD 1945, diamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pendidikan penduduk. Peningkatan kualitas pendidikan sangat penting dilakukan karena pendidikan merupakan tiang dan pondasi terpenting dan mendasar dalam kehidupan.

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan penduduk suatu daerah. Faktor tersebut antara lain adalah adanya sarana dan prasarana sekolah, pembangunan ekonomi secara umum serta kultur dan sosial budaya masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik kuantitas maupun kualitas serta penempatan/lokasi yang tepat akan membuat penduduk mudah menjangkau tempat-tempat pendidikan. Dengan perkembangan ekonomi yang baik dapat meningkatkan pendapatan (income) masyarakat, dan akhirnya masyarakat menjadi mampu menyekolahkan anak hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pengaruh kultur dan sosial budaya memberi dampak pada kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan kasta, suku, agama, dan sejenisnya. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan perbedaan-perbedaan tingkat pendidikan yang dicapai dan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas pendidikan penduduk di suatu wilayah adalah (1) angka melek huruf, (2) partisipasi sekolah, (3) angka putus sekolah, (4) ijazah tertinggi yang ditamatkan, dan (5) rata-rata lama sekolah.

### **3.2.1 Angka Melek Huruf (*Literacy Rate*)**

Angka melek huruf digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar di suatu daerah dalam memperluas ilmu pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Oleh karena itu, angka melek huruf sering kali menjadi alternatif pertama untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Seseorang dikatakan melek huruf jika memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Selama kurun waktu tahun 2011 – 2013 angka melek huruf di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional, pada tahun 2011 angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 82,39 persen. Tahun berikutnya angka ini meningkat menjadi 84,15 persen dan pada tahun 2013 angka melek huruf kembali meningkat menjadi 84,47 persen.

**Tabel 5.**  
**Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2013**

No	Melek Huruf	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Jenis Kelamin</b>			
	- Laki-laki	90,20	92,22	92,35
	- Perempuan	75,22	76,42	76,81
	<b>Total</b>	82,39	84,15	84,47
2	<b>Klasifikasi Daerah</b>			
	- Perkotaan	87,47	86,94	88,63
	- Perdesaan	76,94	81,23	80,11
	<b>Total</b>	82,39	84,15	84,47

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Bila dilihat keterbandingan melek huruf berdasarkan gender, tingkat melek huruf perempuan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2013, angka melek huruf laki-laki sebesar 92,35 persen sedangkan perempuan hanya sebesar 76,81 persen. Hal ini menunjukkan masih terdapat ketimpangan gender dalam kemampuan membaca dan menulis di Kabupaten Klungkung.

Demikian pula halnya jika ditinjau menurut klasifikasi daerahnya. Tingkat melek huruf penduduk di daerah pedesaan pada tahun 2013 sebesar 80,11 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk di daerah perkotaan yakni sebesar 88,63 persen.

### 3.2.2 Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) dan SMA (16-18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$APS_{(7-12th)} = \frac{\left[ \begin{array}{l} \text{Penduduk Usia 7-12 Tahun} \\ \text{yang Masih Sekolah} \end{array} \right]}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100 \%$$

Keterangan:

$APS_{(7-12th)}$  = Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun

Pada tahun 2013,  $APS_{(7-12th)}$  sebesar 100 persen. Ini mengindikasikan bahwa seluruh penduduk usia 7–12 tahun telah mengenyam pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang ditempuhnya. Sedangkan  $APS_{(13-15)}$  sebesar 96,65 persen dan  $APS_{(16-18)}$  sebesar 82,77 persen. Berdasarkan tabel, dari tahun 2011

hingga 2013, terdapat kecenderungan peningkatan pada APS setiap kelompok umur. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

**Tabel 7.**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013**

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	99,13	97,21	69,25
2012	100,00	93,84	75,07
2013	100,00	96,65	82,77

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Selain Angka Partisipasi Sekolah, terdapat juga indikator pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih sekolah pada jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Secara matematis, APM dirumuskan sebagai berikut:

$$APM \text{ SD} = \frac{\left[ \begin{array}{l} \text{Penduduk Usia 7-12 Tahun} \\ \text{Yang Masih Sekolah SD} \end{array} \right]}{\text{Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$$

Keterangan:

APM SD = Angka Partisipasi Murni SD

Pada dasarnya APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Dengan APM maka akan tergambarkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya atau dengan kata lain sudah bersekolah secara tepat waktu sesuai dengan umur mereka.

APM juga bisa disusun menurut jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SMU. Umumnya APM akan selalu lebih kecil atau maksimal sama dengan APS. APM tidak memberikan analisa yang berbeda jauh dari APS, tetapi hanya menggambarkan ketepatan seorang anak untuk bersekolah sesuai dengan umur mereka.

**Tabel 8.**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan**  
**di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2013**

Tahun	Angka Partisipasi Murni		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	92.82	67.69	70.00
2012	96.08	68.69	68.33
2013	97.63	93.74	76.28

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

APM dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan sesuai usia sekolah. Berdasarkan hasil Susenas 2013, APM SD Kabupaten Klungkung sebesar 97,63 persen, yang mengindikasikan bahwa

sebanyak 97,63 persen penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD. APM SMP sebesar 93,74 persen dan APM SMU hanya sebesar 76,28 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap kelompok umur jenjang pendidikan tersebut. Tidak berbeda dengan APS dan APM, APK juga dibedakan menurut jenjang pendidikan dan secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{APK SD} = \frac{\left[ \begin{array}{c} \text{Penduduk Yang} \\ \text{Bersekolah di SD} \end{array} \right]}{\text{Penduduk Usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

Keterangan :

APK SD = Angka Partisipasi Kasar SD

APK pada umumnya digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Dengan APK, maka dapat terlihat bagaimana kondisi murid pada suatu jenjang pendidikan tanpa melihat usianya. Kalau APS dan APM melihat penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikannya, maka APK melihat banyaknya atau persentase penduduk pada jenjang pendidikan tertentu tanpa dibatasi oleh usia mereka.

Pada tahun 2013, APK SD sebesar 105,42 persen, APK SMP sebesar 80,89 persen dan APK SMA sebesar 121,78 persen. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang

pendidikannya. Nilai APK yang lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang bersekolah pada jejang tersebut.

**Tabel 9.**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2013**

No	Tahun	Angka Partisipasi Kasar		
		SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	103,29	88,65	103,50
2	2012	107,87	75,16	101,51
3	2013	105,42	80,89	121,78

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

### 3.2.3 Angka Putus Sekolah

Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, muncul banyak permasalahan pendidikan. Salah satunya adalah ketidakmampuan seorang anak untuk menamatkan jenjang pendidikan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan terdapat sejumlah siswa yang putus sekolah. Fenomena ini cenderung disebabkan oleh faktor ekonomi. Kondisi ini akan lebih jelas pada jenjang pendidikan SD dibandingkan dengan SLTP maupun SLTA, karena jika putus sekolah ini dialami pada tingkat SD berarti kondisi ekonomi keluarga anak sudah tergolong sangat buruk. Dari data selama tiga tahun terakhir, bisa diamati bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi pula angka putus sekolah. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 10.**  
**Angka Putus Sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2013**

No	Tahun	APTS		
		SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	0,87	2,79	24,93
2	2012	0,00	5,07	28,71
3	2013	0,00	3,35	17,23

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

### 3.2.4 Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah, selain dilihat dari angka melek huruf dan partisipasi sekolah, juga dapat diamati dari indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun keatas. Indikator ini menunjukkan kemampuan intelektual dan keterampilan teknis yang didapatkan dari lembaga pendidikan formal. Dalam analisis, indikator ini sering kali digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk diduga semakin baik kualitas SDM daerah tersebut.

Secara umum selama kurun waktu tiga tahun terakhir tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Klungkung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2013, sekitar 37,11 persen penduduk sudah menamatkan pendidikan hingga SMA atau lebih tinggi. Sekitar 20,85 persen penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga SMP dan sisanya sekitar 41,94

persen penduduk berpendidikan rendah yaitu penduduk yang hanya menamatkan pendidikannya hingga SD atau lebih rendah.

**Tabel 11.**  
**Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2013**

No	Ijazah Tertinggi	Tahun		
		2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tidak Tamat SD	19,10	15,98	16,06
2	SD/ sederajat	23,07	27,21	25,88
3	SMP/ sederajat	20,45	20,25	20,95
4	SMA/ sederajat	27,34	27,06	29,32
5	Perguruan Tinggi	10,03	9,50	7,79

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

### 3.2.5 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator penyusun indeks pendidikan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disamping indikator angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Semakin lama atau semakin panjang waktu yang ditempuh oleh penduduk untuk sekolah berarti semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk yang akan berimplikasi pada semakin tingginya kualitas penduduk.

Pada tahun 2011 hingga tahun 2013, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Klungkung berada pada kisaran 7 tahun. Ini berarti rata-rata penduduk usia 15 tahun keatas sudah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP. Hal ini menunjukkan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Klungkung belum tercapai.

**Tabel 12.**  
**Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas**  
**di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2013**

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah
(1)	(2)
2011	7,35
2012	7,43
2013	7,43

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

### 3.3. Perumahan

Selain kebutuhan pangan dan sandang, rumah adalah salah satu kebutuhan pokok yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau tingkat kesejahteraan keluarga. Pembangunan di sektor perumahan sebagai kebutuhan pokok (primer) merupakan bagian dari upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai kebutuhan dasar, rumah berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan sebagai tempat berkumpulnya keluarga. Karena fungsinya yang sangat penting dalam kehidupan tersebut maka rumah diharapkan memenuhi berbagai standar kesehatan sehingga kenyamanan dan kesejahteraan penghuninya bisa diwujudkan.

Saat ini, rumah bahkan dapat menunjukkan status sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang relatif sudah mapan dalam memenuhi semua kebutuhannya cenderung untuk memiliki rumah dengan kualitas bangunan rumah yang baik, dan dengan fasilitas yang lengkap. Fasilitas yang ada di dalam rumah merupakan sarana yang bisa menunjukkan keadaan penghuninya. Keadaan rumah dengan dinding, lantai, atap dari bahan yang mahal dengan ukuran yang relatif luas dengan dilengkapi fasilitas yang baik mencerminkan status dan selera dari penghuninya. Keadaan sebaliknya juga bisa menjadi bahan untuk menilai keadaan suatu rumah tangga.

Atas dasar tersebut maka kondisi yang berkaitan dengan perumahan bisa dijadikan sebagai salah satu indikator untuk merencanakan dan mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan memantau indikator ini dari tahun ke tahun maka kita bisa menganalisa secara lebih mendalam tingkat kesejahteraan masyarakat.

### **3.3.1 Kualitas bangunan rumah**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pembangunan sebuah rumah harus memenuhi kualitas bangunan yang baik. Tempat tinggal yang baik adalah tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, sehingga dapat menjamin orang yang tinggal di dalamnya dapat hidup dengan layak dan nyaman.

Ada beberapa indikator yang dapat menggambarkan kualitas perumahan di Kabupaten Klungkung. Diantaranya adalah

Luas Lantai, Jenis Lantai Terluas, Jenis Atap Terluas, dan Jenis Dinding Terluas.

**Tabel 13.**  
**Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Klungkung**  
**Tahun 2011 – 2013**

No	Indikator	Kualitas	Tahun		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Luas Lantai Perkapita	< 8 m <sup>2</sup>	12,67	9,45	9,60
		>= 8 m <sup>2</sup>	87,33	90,55	90,40
2	Jenis Lantai Terluas	Tanah	2,57	2,10	1,24
		Bukan Tanah	97,43	97,90	98,76
3	Jenis Atap Terluas	Ijuk, Rumbia, dsb	1,01	0,74	0,81
		Genteng, Beton, Seng, Sirap, Asbes	98,99	99,26	99,19
4	Jenis Dinding Terluas	Tembok	98,13	98,73	97,96
		Bukan Tembok	1,87	1,27	2,04

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Secara umum kualitas bangunan tempat tinggal yang dihuni oleh penduduk Kabupaten Klungkung relatif baik. Pada tahun 2013, 90,40 persen rumah tangga sudah memenuhi standar kelayakan tempat tinggal berdasarkan kementerian kesehatan dimana luas lantai perkapita minimal 8m<sup>2</sup>. Demikian pula halnya dengan jenis lantai. Hanya 1,24 persen rumah tangga yang menggunakan lantai

tanah sedangkan sisanya menggunakan lantai bukan tanah. Kondisi serupa juga terlihat pada jenis atap terluas yang digunakan. Hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Klungkung menggunakan atap genteng, beton, sirap, seng maupun asbes. Baiknya kualitas perumahan di Kabupaten Klungkung juga terlihat dari jenis dinding yang digunakan. Hanya 2,04 persen rumah tangga di Kabupaten Klungkung yang menggunakan dinding yang bukan tembok. Dari beberapa indikator tersebut, terlihat bahwa secara umum kualitas perumahan di Kabupaten Klungkung sudah memenuhi standar minimal kesehatan.

### **3.3.2 Fasilitas rumah**

Fasilitas rumah tentu akan mendukung kehidupan penghuninya. Rumah yang didukung oleh fasilitas memadai yang memenuhi syarat-syarat kesehatan tentunya akan lebih nyaman untuk ditinggali. Kelengkapan fasilitas meliputi sumber penerangan, ketersediaan air bersih, fasilitas air minum, sanitasi, serta fasilitas buang air besar. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, air minum yang memenuhi syarat kesehatan, serta ketersediaan fasilitas buang air besar selain menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga menggambarkan kondisi sarana dan prasarana fisik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

**Tabel 14.**  
**Indikator Fasilitas Perumahan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2013**

No	Indikator	Kualitas	Tahun		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumber Penerangan	Listrik	96,50	98,92	99,73
		Bukan Listrik	3,50	1,08	0,26
2	Fasilitas Air Minum	Sendiri	61,24	52,42	54,91
		Bersama	29,99	37,46	38,46
		Umum	6,27	9,43	4,61
		Tidak Ada	2,50	0,69	2,03
3	Cara Memperoleh Air Minum	Membeli	62,41	74,65	57,81
		Tidak	37,59	35,35	42,19
4	Sumber Air Minum	Air Bersih	81,64	70,14	78,92
		Non Air Bersih	18,36	29,86	21,08
5	Sanitasi	Layak	76,37	81,76	82,87
		Tidak Layak	23,63	18,24	17,13
6	Fasilitas BAB	Sendiri	60,62	62,24	72,15
		Bersama	20,44	20,11	12,98
		Umum	0,76	0,00	0,00
		Tidak Ada	18,18	17,65	14,87

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Secara umum hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Klungkung menggunakan listrik. Lebih dari 95 persen rumah tangga

menggunakan fasilitas air minum, baik yang digunakan oleh rumah tangga itu sendiri, digunakan secara bersama-sama maupun yang menggunakan fasilitas umum. Lebih dari 50 persen penduduk mendapatkan air minum dengan cara membeli. Sebagian besar air minum yang dikonsumsi penduduk bersumber dari air bersih. Jenis air yang diklasifikasikan sebagai air bersih adalah air kemasan, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, sumur/bor/pompa\*, sumur terlindung\*, dan mata air terlindung\* (\*dengan jarak  $\geq 10$  m dari tempat pembuangan limbah terdekat). Sekitar 21 persen penduduk menggunakan air minum tidak bersih yang bersumber dari sumur maupun mata air tidak terlindung, air sungai, air hujan, dan lainnya. Hanya 2 sampai 5 persen penduduk yang menggunakan sumber air lainnya misalnya sumur/mata air tak terlindung, air hujan, air sungai atau lainnya. Demikian pula halnya dengan penggunaan fasilitas buang air besar. Hanya kurang dari 15 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar. Bahkan lebih dari 70 persen rumah tangga menggunakan fasilitas buang air besar yang hanya dipakai sendiri.

### **3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan manusia senantiasa menjadi salah satu aspek utama perencanaan pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of *enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990).

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 komponen utama, yaitu:

- a) Peningkatan produktivitas dan partisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berubah.
- b) Akses untuk memperoleh kesempatan yang adil.
- c) Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
- d) Pembangunan harus dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Angka IPM memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Atau dengan kata lain untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*).

Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir ( $e_0$ ). Pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas.

Hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada paritas daya beli dalam rupiah (*purchasing power parity*).

Selama kurun waktu 2011 - 2013, IPM Kabupaten Klungkung senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tercatat IPM Kabupaten Klungkung sebesar 71,02 meningkat menjadi 71,76 tahun 2012. Dan pada tahun 2013 IPM Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan mencapai 72,25.

**Tabel 15.**  
**IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013**

No	Kab/Kota	IPM			Rank 2013
		2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jembrana	73.18	73.62	74.29	5
2	Tabanan	75.24	75.55	76.19	3
3	Eadung	75.35	75.69	76.37	2
4	Gianyar	73.43	74.49	75.02	4
5	<b>Klungkung</b>	<b>71.02</b>	<b>71.76</b>	<b>72.25</b>	<b>8</b>
6	Bangli	71.42	71.80	72.28	7
7	Karangasem	67.07	67.83	68.47	9
8	Buleleng	71.12	71.93	72.54	6
9	Kota Denpasar	78.31	78.80	79.41	1
	<b>BALI</b>	<b>72.84</b>	<b>73.49</b>	<b>74.11</b>	<b>15</b>

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, 2011 – 2013

### 3.4.1 Indikator Kesehatan

Indikator Kesehatan yang digunakan untuk pembentukan IPM adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu. Secara makro angka harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Peningkatan angka harapan hidup mengindikasikan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan.

**Tabel 16.**  
**Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2011 – 2013**

No	Kab/kota	AHH			Rank 2013
		2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jembrana	71.88	71.95	72.31	4
2	Tabanan	74.49	74.55	74.91	1
3	Badung	71.85	71.91	72.24	5
4	Gianyar	72.17	72.22	72.56	3
5	<b>Klungkung</b>	<b>69.15</b>	<b>69.20</b>	<b>69.52</b>	<b>8</b>
6	Bangli	71.73	71.81	72.18	6
7	Karangasem	67.95	68.00	68.32	9
8	Buleleng	69.34	69.53	70.00	7
9	Kota Denpasar	73.06	73.12	73.46	2
<b>BALI</b>		<b>70.78</b>	<b>70.84</b>	<b>71.20</b>	

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, 2011 – 2013

Sejak tahun 2011 hingga tahun 2013, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, harapan hidup penduduk Kabupaten Klungkung 69,15 tahun sedangkan pada tahun 2013 menjadi 69,52 tahun. Angka ini berada dibawah rata-rata harapan hidup Provinsi Bali. Oleh karena itu, perlu dilakukan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk pemberantasan kemiskinan.

#### **3.4.2 Indikator Pendidikan**

Indikator pendidikan merupakan indeks komposit antara angka melek huruf dengan rata-rata lama sekolah. Untuk Kabupaten Klungkung, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas juga terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 hanya 82,39 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis tetapi pada tahun 2013 angka ini meningkat cukup signifikan hingga mencapai 84,47 persen. Namun, bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Kabupaten Klungkung hanya menduduki peringkat 8 dari 9 kabupaten di Bali.

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani penduduk untuk bersekolah. Seperti halnya angka melek huruf, dibandingkan dengan tahun 2011 rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah 7,35 tahun sedangkan pada tahun 2013 peningkatannya hanya mencapai 7,43 tahun. Ini berarti hingga tahun 2013 rata-rata penduduk Kabupaten Klungkung hanya mengenyam pendidikan

formal kurang lebih sampai tahun pertama SMP. Secara regional Kabupaten Badung menempati posisi kedua jika dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali.

**Tabel 17.**  
**Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013**

No	Kab/Kota	AMH			Rank 2013
		2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jembrana	90.69	91.36	92.65	3
2	Tabanan	90.82	90.86	91.92	4
3	Badung	92.96	93.01	93.93	2
4	Gianyar	86.81	88.79	89.38	6
5	<b>Klungkung</b>	<b>82.39</b>	<b>84.15</b>	<b>84.47</b>	<b>8</b>
6	Bangli	85.64	85.83	85.91	7
7	Karangasem	74.12	76.03	76.94	9
8	Buleleng	88.63	89.94	90.53	5
9	Kota Denpasar	97.49	97.52	97.95	1
<b>BALI</b>		<b>89.17</b>	<b>90.17</b>	<b>91.03</b>	

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, 2011 - 2013

**Tabel 18.**  
**Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013**

No	Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah			Rank 2013
		2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jembrana	7.81	7.86	7.87	5
2	Tabanan	8.37	8.39	8.40	4
3	Badung	9.45	9.47	9.51	2
4	Gianyar	8.37	8.90	8.90	3
5	<b>Klungkung</b>	<b>7.35</b>	<b>7.43</b>	<b>7.43</b>	<b>7</b>
6	Bangli	6.66	6.68	6.70	8
7	Karangasem	5.82	5.88	5.90	9
8	Buleleng	7.36	7.54	7.55	6
9	Kota Denpasar	10.70	10.94	11.05	1
<b>BALI</b>		<b>8.35</b>	<b>8.57</b>	<b>8.58</b>	

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, 2011 - 2013

### 3.4.3 Indikator Pendapatan

Kemampuan ekonomi penduduk tercermin dari tingkat pendapatan yang diperoleh. Tetapi pada prakteknya pengumpulan data pendapatan sulit dilakukan sehingga digunakan data pengeluaran sebagai pendekatan. Data pengeluaran mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, makanan maupun non-makanan. Namun demikian, nilai nominal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi suatu daerah. Oleh karena itu dalam penghitungan

IPM nilai pengeluaran perkapita dikoreksi dengan dengan inflasi dan paritas daya beli sehingga diperoleh suatu indikator tingkat kesejahteraan yang memiliki keterbandingan antar tempat dan waktu. Sehingga dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya ekonomi.

**Tabel 19. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2013**

No	Kab/Kota	PPP			Rank 2013
		2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jembrana	635.24	637.96	640.30	9
2	Tabanan	637.26	640.54	643.24	8
3	Badung	641.27	644.94	648.25	4
4	Glanyar	642.18	644.69	647.37	5
5	<b>Klungkung</b>	<b>655.28</b>	<b>658.53</b>	<b>661.73</b>	<b>1</b>
6	Bangli	639.00	642.64	645.69	6
7	Karangasem	651.11	654.46	657.79	2
8	Buleleng	637.03	640.64	643.38	7
9	Kota Denpasar	645.85	649.48	652.54	3
<b>BALI</b>		<b>637.86</b>	<b>640.86</b>	<b>643.78</b>	

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, 2011 - 2013

Pada tahun 2013, pengeluaran perkapita Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 661,73 ribu per bulan, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Bali yang hanya sebesar Rp 643,78

ribu per bulan. Ini menunjukkan tingginya daya beli masyarakat Kabupaten Klungkung.

<http://klungkungkab.bps.go.id>



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



### BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLUNGKUNG

Jl. Raya Besakih, Desa Akah, Kec. Klungkung  
Tlp. (0366) 21180, Fax. (0366) 24242, E-mail : [bps5105@bps.go.id](mailto:bps5105@bps.go.id)  
Homepage : <http://klungkungkab.bps.go.id>